

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji strategi pengawasan penyebaran hoaks pada Pemilu dengan pendekatan Actor-Network Theory (ANT), dan menemukan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) berperan sebagai aktor utama (aktor inisiator) dalam membangun dan mengelola jaringan pengawasan yang kompleks dan dinamis. Dalam proses problematisasi, Bawaslu secara proaktif mengidentifikasi hoaks sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu dan demokrasi. Hal ini mendorong Bawaslu untuk menarik aktor-aktor lainnya—baik manusia maupun non-manusia—ke dalam jaringan pengawasan dan pencegahan hoaks yang terstruktur.

Dalam konteks pencegahan penyebaran hoaks di media sosial selama Pemilu 2024, Bawaslu RI memulai momen *problematisasi* dengan mengidentifikasi hoaks sebagai ancaman terhadap integritas pemilu, memosisikan dirinya sebagai aktor kunci yang menjembatani berbagai kepentingan dalam pengawasan digital, serta menetapkan Kominfo dan KPU sebagai aktor strategis dalam jaringan. Pada tahap *penarikan*, Bawaslu membangun forum koordinasi, pertemuan lintas lembaga, serta nota kesepahaman untuk menegosiasikan peran antar-aktor, termasuk penanganan hoaks secara teknis oleh Kominfo dan penyebaran informasi resmi oleh KPU. Momen *pelibatan* terjadi saat setiap aktor mulai menyepakati pembagian tugas sesuai kewenangan: Bawaslu menerima aduan publik dan mengawasi konten, Kominfo menindak konten hoaks secara digital, dan KPU menyuplai data pemilu yang valid dan terbuka. Tahap *mobilisasi* ditandai dengan pelaksanaan strategi bersama seperti patroli siber, kampanye literasi digital, serta pemanfaatan kanal pelaporan partisipatif seperti “Jarimu Awasi Pemilu”, yang menjadi bukti konkret sinergi antar-aktor untuk menjalankan fungsi pengawasan secara kolaboratif, dinamis, dan terarah.

**Muhammad Nur Apriyanto, 2025**

***DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Selanjutnya, koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan Kominfo dalam upaya pencegahan hoaks pada Pemilu 2024 menunjukkan komitmen kolaboratif yang positif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan mandat kelembagaan dan pola kerja masing-masing instansi terkadang menyebabkan proses pengambilan keputusan tidak berjalan secepat dinamika penyebaran informasi di media sosial. Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam mengakses atau meminta tindakan cepat dari platform digital global juga menjadi kendala tersendiri. Meski demikian, langkah-langkah seperti forum diskusi bersama, penandatanganan nota kesepahaman, dan pelaksanaan kampanye literasi digital merupakan bukti adanya upaya harmonisasi peran antar-aktor. Dalam perspektif *Actor-Network Theory*, keberhasilan pengawasan hoaks membutuhkan kerja sama yang terus disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk keterlibatan teknologi, regulasi, dan pemahaman bersama. Oleh karena itu, perbaikan komunikasi lintas lembaga dan penguatan koordinasi teknis tetap diperlukan agar pengawasan dapat berjalan lebih sinergis dan adaptif terhadap perkembangan informasi digital.

Sebagai **penutup**, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pengawasan hoaks berbasis model Actor-Network Theory telah menunjukkan efektivitas nyata. Merujuk pada data Kominfo, sepanjang periode Januari 2023 hingga Januari 2024 tercatat **204 isu hoaks** terkait Pemilu 2024—bandingkan dengan 714 kasus pada 2018–2019, menunjukkan penurunan signifikan sekitar 71%. Selama masa kampanye sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kominfo berhasil mengambil tindakan terhadap **51 konten hoaks** dan menerbitkan **175 klarifikasi resmi**, yang menjadi bukti koordinasi cepat antara Bawaslu, Kominfo, dan platform digital.

Menurut survei *Public Trust & Information Integrity* yang dirilis oleh CSIS Indonesia (2023), meskipun keberadaan hoaks masih signifikan dalam politik digital, terdapat tren peningkatan kesadaran dan dukungan publik

Muhammad Nur Apriyanto, 2025

**DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

terhadap intervensi pemerintah. Hasil survei mencatat bahwa 42% masyarakat Indonesia mengaku pernah mempercayai informasi palsu terkait pemilu, namun 67% menyatakan mendukung kebijakan moderasi konten dan langkah hukum terhadap penyebar hoaks. Hal ini menunjukkan adanya legitimasi publik terhadap peran lembaga negara seperti Bawaslu dan Kominfo dalam melakukan pengawasan digital secara aktif (CSIS Indonesia, 2023).

Selaras dengan itu, data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah isu hoaks terkait Pemilu dari 714 isu pada Pemilu 2019 menjadi 204 isu selama periode Januari 2023 hingga Januari 2024, atau turun sekitar 71% (Kominfo, 2024). Selama masa kampanye 2024, tepatnya sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kominfo juga berhasil menindak 51 konten hoaks dan menerbitkan 175 klarifikasi resmi (KBR, 2024). Penurunan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas teknologi moderasi dan deteksi dini yang digunakan oleh Kominfo, tetapi juga menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara aktor manusia (lembaga, masyarakat, komunitas digital) dan aktor non-manusia (algoritma, platform digital, regulasi) sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan Actor-Network Theory (ANT). Dengan demikian, pendekatan jaringan kolaboratif yang melibatkan Bawaslu, Kominfo, serta platform digital dan organisasi masyarakat sipil seperti MAFINDO telah membentuk respons kolektif yang relatif efektif dalam menjaga integritas informasi selama Pemilu 2024. Keberhasilan ini menjadi model strategis yang dapat direplikasi untuk penanggulangan disinformasi di masa-masa krusial demokrasi digital Indonesia ke depan.

Penurunan ini memperkuat kesimpulan bahwa kolaborasi antar-aktor—Bawaslu sebagai pengawas, Kominfo sebagai regulator teknis, dan KPU sebagai penyedia data resmi—ditambah kampanye literasi oleh mitra seperti MAFINDO, berhasil mengurangi intensitas serta dampak hoaks dalam

**Muhammad Nur Apriyanto, 2025**

***DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

ekosistem media sosial. Meskipun tantangan seperti ritme respons yang masih perlu dipercepat dan keterbatasan wewenang terhadap platform global masih ada, data yang ada jelas menunjukkan **reduksi signifikan penyebaran hoaks**, menandakan keberhasilan strategi pengawasan bersama dalam menjaga integritas pemilu 2024.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, maka disampaikan beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi bagi Bawaslu RI dan aktor-aktor lainnya dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap hoaks pada pemilu mendatang.

Pertama, penting bagi Bawaslu dan mitra strategisnya untuk meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan informasi digital. Penggunaan algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI), sistem pendeteksi otomatis, serta integrasi basis data antara lembaga perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini akan membantu mendeteksi penyebaran hoaks secara real-time dan memungkinkan respons yang lebih cepat serta efisien terhadap konten berbahaya yang beredar.

Kedua, perlu disusun kerangka kerja formal dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur alur kerja dan pembagian tugas antar lembaga. SOP ini harus menjelaskan batasan kewenangan secara rinci dan dapat dijadikan acuan dalam situasi krisis informasi, sehingga dapat mencegah konflik kewenangan ataupun miskomunikasi antar aktor dalam jaringan pengawasan.

Ketiga, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan melalui program edukasi yang berkelanjutan dan bersifat kolaboratif. Kampanye publik, pelatihan komunitas, serta kerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi dapat dijadikan strategi jangka panjang untuk membentuk warga digital yang kritis dan cerdas. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hoaks, semakin kecil pula ruang gerak penyebar disinformasi.

Keempat, Bawaslu dan lembaga mitra perlu terus memperkuat kerja sama dengan aktor-aktor non-pemerintah seperti media, jurnalis, akademisi,

**Muhammad Nur Apriyanto, 2025**

***DINAMIKA RELASI MULTI-AKTOR DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024,***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, S1 Ilmu Politik

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

dan komunitas digital. Sinergi ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi konten secara crowdsourced, menyebarkan klarifikasi hoaks lebih luas, serta membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bebas dari manipulasi informasi.

Terakhir, evaluasi dan penyesuaian strategi kolaborasi perlu dilakukan secara rutin. Dalam dunia digital yang berubah cepat, metode pengawasan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, algoritma media sosial, dan pola baru penyebaran hoaks. Monitoring dan evaluasi berkala dapat membantu Bawaslu dan para mitra mengevaluasi efektivitas langkah yang telah diambil dan merancang kebijakan baru yang lebih responsif dan kontekstual.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan terhadap hoaks dalam pemilu mendatang akan berjalan lebih efektif, kolaboratif, dan mampu memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.